

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENANAMAN MODAL

Suspim G.P Nainggolan ^{)}*

*Budiman Ginting ^{**)}*

*Mahmul Siregar ^{***)}*

ABSTRACT

ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) is a free agreement which is formed the member countries of ASEAN with China. ACFTA is one of the free Trade Agreement that has been agreed since 2001, and are formed based on the basic of international law, namely the Framework Agreement and Comprehensive Economic Co-operation between ASEAN and The People's Republic of China, which is signed on 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, by the heads of government from ASEAN countries and The People's of Republic of China. Indonesia is a big Country and also one of pioneers of the establishment of ASEAN region which also supports the establishment of ASEAN-China Free Trade Agreement. That is why Indonesia must implication to regulate in Investment Law. The Investment Of law was being hope to Increase The economic Of Indonesia form using that Agreement and to cope with negatife consequence in ASEAN –China Free Trade Agreement

Keywords: ACFTA, Free Trade, Free Trade Agreement

PENDAHULUAN

Hubungan perdagangan Internasional antara negara sudah ada sejak lama. Hubungan ini sudah ada sejak adanya negara-negara dalam arti kebangsaan, yaitu bentuk awal negara dalam arti modern. Perjuangan negara-negara ini untuk memperoleh kemandirian dan pengawasan (kontrol) terhadap ekonomi internasional telah memaksa negara-negara ini untuk mengadakan hubungan-hubungan perdagangan yang mapan dengan negara-negara lainnya. Mereka menyadari bahwa perdagangan adalah satu-satunya cara untuk pembangunan ekonomi mereka.¹

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional ini maka salah satu cara juga untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara melalui perdagangan internasional ini ialah melalui penanaman modal terutama penanaman modal dari negara-negara maju yang memiliki pemodal-pemodal besar.

Modal juga dibutuhkan untuk mengelola sumber daya alam, dan potensi ekonomi yang berada di bawah suatu otoritas negara. Adanya pengelolaan secara optimal terhadap sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada, diharapkan menimbulkan nilai tambah, tidak saja bagi negara akan tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Adapun wujud pengelolaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada tersebut antara lain dapat dilakukan oleh penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Untuk penanam modal asing pada umumnya merupakan perusahaan multinasional (*multi national corporation, MNC*). Jenis perusahaan ini hampir dapat dipastikan telah mempunyai jaringan bisnis yang cukup kuat di berbagai

^{*)} Penulis.

^{**)} Dosen Pembimbing I.

^{***)} Dosen Pembimbing II.

¹Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 19.

negara.² Salah satu kebijaksanaan mengundang modal asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, sehingga Indonesia dapat meningkatkan penghasilan devisa dan mampu menghemat devisa, untuk itu prioritas dan fasilitas diberikan pada usaha di bidang peningkatan ekspor dan substitusi impor.³

Masuknya modal asing kesuatu negara bisa melalui suatu perjanjian internasional secara regional. Kerjasama atau perjanjian perdagangan secara regional adalah perjanjian dua atau lebih negara yang bertujuan untuk mengurangi hambatan dalam melakukan penanaman modal dari satu negara ke negara tujuan penanaman modal. Salah satu bentuk perjanjian perdagangan secara regional adalah *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA).

Probelematika yang muncul kemudian adalah konteks kesiapan Indonesia dalam ACFTA ini terutama dalam menyediakan sarana pengaturan di bidang hukum penanaman modal. Dengan dibukanya pintu perdagangan bebas versi ACFTA ini, Indonesia diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi penanam modal asing dari China untuk memasukan modalnya ke Indonesia. Kemudahan ini ukuran pasti dikarenakan telah lama Indonesia dianggap oleh penanam modal asing merupakan negara yang berpotensi namun memiliki hambatan di bidang hukum penanaman modalnya, terutama persyaratan yang sangat ketat sehingga rentan terhadap munculnya penyimpangan-penyimpangan. Kendala penanaman modal di Indonesia yang umum terjadi adalah misalnya : pengurusan ijin yang terlalu berbelit-belit, perilaku negatif birokrasi, pembatasan bidang usaha, kelemahan infrastruktur yang mendukung penanaman modal, serta belum terciptanya kepastian hukum dan penegakan hukum, disamping juga fasilitas perpajakan.⁴

Pertemuan KTT-12 ASEAN di Cebu, Philipina, januari 2007, serta persetujuan penanaman modal ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41

tingkat Menteri Ekonomi ASEAN , 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Oleh karena telah di sahkannya ACFTA secara formal, maka Indonesia perlu untuk menyesuaikan diri dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam ACFTA, dimana pada pokoknya dalam 10 tahun akan dikuatkan kerjasama ekonomi antara China dan ASEAN dengan melakukan berbagai strategi yang diharapkan dapat menguatkan kerjasama ekonomi tersebut.⁵

PERUMUSAN MASALAH

Dengan latar belakang tersebut diatas maka dapat dalam jurnal ini dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kesepakatan Asean –China Free Trade Agreement (ACFTA) di bidang penanaman modal, dan bagaimana taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia dengan kesepakatan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), kemudian mempermasalahkan bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi dampak dari perjanjian ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) di bidang penanaman modal.

Didalam jurnal ini terkait peraturan perundang-undangan lainnya; Perjanjian ACFTA yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*. Penelitian dalam jurnal ini juga menggunakan jenis penelitian normatif. Hal ini ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), atau biasa dikenal dengan sebutan studi kepustakaan, walaupun penelitian yang dimaksud tidak lepas pula dari sumber lain selain sumber kepustakaan, yakni penelitian terhadap bahan media massa ataupun dari internet. Penulis juga menggunakan metode pendekatan yuridis, dengan mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan hidup dalam masyarakat.

²Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, edisi revisi cetakan kedua, (Bandung: Nusa Aulia, 2007), hal. 3.

³Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 34.

⁴Setyo Pamungkas, *Op. Cit.*

⁵*Ibid*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian Indonesia, untuk itu perjanjian ACFTA harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengundang investor dari China untuk menanamkan modalnya di Indonesia terutama penanaman modal langsung.

Dari sudut pandang investor adanya keterbukaan melalui perjanjian ACFTA ini membuka peluang untuk menanamkan modal ke Indonesia. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi investor dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat ada perbedaan kedua pandangan antara Investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk mengakomodasi kedua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas.⁶

Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima-penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah ada pun bisa jadi akan merelokasikan perusahaan dan modalnya.⁷ Perjanjian ACFTA sendiri merupakan sarana bagi peningkatan penanaman modal dari China ke Indonesia, dan perjanjian tersebut mendorong agar dilakukan pembaharuan hukum penanaman modal di Indonesia dimana pengaturan tersebut nantinya dapat mengakomodasi antara kepentingan Indonesia sendiri dengan kepentingan Investor dari China dalam menanamkan modalnya.⁸

Tidak hanya pengaturan penanaman modal, pemerintah juga harus tanggap untuk mencari solusi selain membuat pengaturan penanaman modal untuk menghadapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut, dan menurut MS Hidayat Menteri Perindustrian pemerintah dan seluruh jajarannya agar

memperbaiki berbagai regulasi, aturan, biaya-biaya pungutan liar, bunga Bank yang tinggi, pengawasan impor di setiap pelabuhan, penindakan hukum terhadap penyeludupan dan masih banyak lagi.

Namun dalam berjalannya ACFTA ini yang sebenarnya tidak hanya dari usaha Pemerintah tapi seluruh masyarakat Indonesia turut bekerjasama untuk mendukung pemerintah untuk dapat memanfaatkan perjanjian ACFTA ini sehingga dampak negatif dari perjanjian ini dapat diatasi atau diminalisasi dan untuk mendapat keuntungan seperti yang diharapkan dapat terealisasi. Walaupun sejak berlakunya perjanjian ACFTA ini sampai sekarang hal itu tidak terjadi karena dalam beberapa penelitian mengatakan neraca perdagangan Indonesia-China tidak seimbang dan Indonesia mengalami defisit bahkan sebelum ACFTA diberlakukan.⁹ Untuk itu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi dampak dari perjanjian ACFTA ini harus lebih ditingkatkan lagi dan masyarakat juga harus bekerjasama untuk membantu setiap program pemerintah dalam menghadapi dampak perjanjian ACFTA ini.

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam bab-bab yang terdahulu sebelumnya, maka untuk meringkas atau memperinci rangkuman dari apa yang telah diuraikan dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pembentukan kesepakatan perdagangan bebas regional dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO) adalah dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal XXIV GATT tentang diperbolehkannya pembentukan kerjasama regional dibidang perdagangan. Namun demikian dipersyaratkan bahwa pembentukan perjanjian perdagangan regional tersebut tidak boleh menjadi rintangan bagi perdagangan multilateral. Salah satu perjanjian perdagangan regional

⁶*Ibid*, hal. 4.

⁷*Ibid*, hal. 5.

⁸Setyo pamungkas, *Op.Cit*, hal. 3.

⁹"Produk China di Setiap Lini", *Kompas* 12 April 2011.

yang ada saat ini adalah *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, sebuah organisasi regional negara-negara di ASIA tenggara. AFTA lahir pada tahun 1995 dengan tujuan untuk memberikan keuntungan-keuntungan perdagangan bagi negara-negara yang berasal dari ASEAN. Dan Perdagangan bebas ASEAN atau AFTA sudah diputuskan terhitung mulai 1 Januari 2010 China dipastikan bergabung lewat apa yang disebut dengan *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)*. Perjanjian ACFTA merupakan wadah bagi Indonesia dalam meningkatkan penanaman modal asing, dengan memanfaatkan investor dari China untuk menanamkan modalnya di Indonesia. ACFTA yang merupakan sarana bagi peningkatan penanaman modal di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari beberapa tujuan perjanjian ACFTA yang berkaitan langsung dengan penanaman modal yaitu memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan penanaman modal antara penanaman modal antara negara-negara anggota dan meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah penanaman modal. dan hal ini diperkuat dengan dituangkannya konteks penanaman modal yang ingin diwujudkan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam article 5, yakni *to promote investments and to create a liberal, facilitative, transparent and competitive investment regime, the Parties agree to: (a) enter into negotiations in order to progressively liberalize the investment regime; (b) strengthen cooperation in investment, facilitate investment and improve transparency of investment rules and regulations; and (c) provide for the protection of investments.* Dan hal ini memberikan dorongan agar di Indonesia dilakukan pembaharuan hukum penanaman modal, atau bilamana dimungkinkan, dilakukan perubahan-perubahan seperlunya yang dapat mengakomodir kepentingan penanaman modal di Indonesia, agar tujuan penanaman modal di Indonesia dapat tercapai.

2. Untuk mengantisipasi perkembangan kerjasama internasional dan mengacu kepada kepentingan nasional, maka dipandang perlu memantapkan dan mengadakan penataan serta penyesuaian ketentuan mengenai penanaman modal langsung di Indonesia dengan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi dari sebuah perjanjian Internasional untuk dapat mensinkronisasi perjanjian internasional tersebut. Dalam rangka sinkronisasi dan untuk mengakomodasi kepentingan ACFTA yang berdasarkan isi perjanjian dalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*, sebagaimana telah diratifikasi, membentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ACFTA. Selain undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, yang menjadi payung hukum utama bagi penanaman modal bagi oleh investor asing maupun investor dalam negeri dan berbagai peraturan pelaksana yang lahir dari UUPM ini. Juga diundangkan berbagai peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang No.39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden No.54 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan beberapa peraturan menteri keuangan yang mengakomodasi dari pada perjanjian ACFTA merupakan bentuk sinkronisasi dari perjanjian ACFTA terhadap pengaturan penanaman modal di Indonesia agar perjanjian ACFTA tersebut dapat memenuhi tujuan dari pada penanaman modal di Indonesia.
3. Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA merupakan salah satu bentuk liberalisasi dan globalisasi ekonomi di Indonesia. Berbicara mengenai perjanjian ACFTA tentunya ada dampak yang diperoleh dari perjanjian tersebut, walaupun tujuan perjanjian ACFTA sendiri bila dilihat secara umum dapat menunjang peningkatan perekonomian di Indonesia, tapi dalam prakteknya, perjanjian perdagangan bebas

ACFTA tidaklah selalu berdampak positif karena tidak selalu menguntungkan para pihak. Perdagangan ACFTA ini menimbulkan dampak negatif seperti eksploitasi terhadap negara berkembang, rusaknya industri lokal, keamanan barang menjadi lebih rendah dan sebagainya. Untuk menanggulangi dampak negatif dari perjanjian ACFTA, pemerintah sebagai pemegang kedaulatan, selain menerapkan prinsip *good governance* di dalam pengurusan pemerintah, Pemerintah juga telah melakukan upaya langsung dengan melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintahan China melalui perwakilannya dan menghasilkan beberapa kesepakatan yang dapat menanggulangi dampak negatif dari perjanjian ACFTA bahkan meningkatkan penanaman modal asing terutama dari investor dari China. Pemerintah juga telah melakukan mengadakan aturan-aturan, *safeguard*, anti *dumping* dan anti subsidi. Dan hal ini berkaitan dengan pasal III GATT yang merupakan *prinsip national treatment*. Pemerintah juga dapat melakukan pemberian perlindungan terhadap sektor-sektor yang rawan kesulitan akibat pelaksanaan ACFTA, memproteksi, menawarkan insentif bagi produsen dalam negeri dan menguatkan permintaan domestik. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan hambatan terhadap desakan produk impor dengan melakukan pengetatan, pengawasan pemberlakuan instrument non-tarif, penguatan kapasitas industri dalam negeri, menerapkan wajib standart nasional Indonesia (SNI) bagi semua produk lokal serta paling penting adalah menanamkan kecintaan masyarakat Indonesia akan produk dalam negeri. Selain itu Pemerintah juga memperbaharui peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perjanjian ACFTA. Dan terakhir Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang andal. Artinya, sumber daya manusia yang ada ditingkatkan daya saingnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan kehadiran investor asing baik oleh karena perjanjian ACFTA ini maupun perjanjian-

perjanjian regional lainnya, ataupun juga perjanjian multilateral dan bilateral dengan negara-negara lain.

B. SARAN

1. Perjanjian ACFTA ini masih relatif kecil dalam hal Perkembangan Penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal China ke Indoensia melauai data yang diperoleh Badan Kekhususan Penanaman Modal (BKPM) mulai ditandatangani perjanjian ACFTA tahun 2004 sampai tahun 2009 tidak mengalami peningkatan rata-rata hanya sebesar 0,006 persen, sedangkan sebelumnya juga rata-rata sebesar 0,006 persen, hal ini terjadi disebabkan adanya sejumlah keluhan mengenai kesulitan yang dihadapi jika peraturan hukum dan peraturan peundang-undangan kita diperhadapkan pada kebutuhan masyarakat hukum modern, kata Yusril Izha Mahendra. Untuk itu perlu adanya perbaikan hukum di Indonesia perlu melakukan berbagai kebijakan yang lebih populer yang dikenal dengan istilah deregulasi yang dapat meningkatkan tingkat penanaman modal asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia dan juga yang dapat melindungi kepentingan nasional.
2. Pamarintah harus melakukan hambatan terhadap produk-produk China yang membanjiri pasar Indonesia dengan harga yang sangat kompetitif, dimana produk dari China tersebut terbukti membuat produk-produk Indonesia kalah bersaing. Pemerintah sebaiknya melakukan tindakan dengan cara melakukan pengetatan, pemberlakuan instrument non-tarif, penguatan kapasitas industri, menerapkan wajib standart nasional Indonesia (SNI) bagi semua produk lokal serta menanamkan kecintaan masyarakat Indonesia akan produk dalam negeri. Selain itu untuk dapat menyerap hasil yang maskimal dari perjanjian ACFTA terkait dengan penanaman modal, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang andal. Artinya, sumber daya manusia yang ada ditingkatkan daya saingnya, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan

kehadiran investor asing baik oleh karena perjanjian ACFTA ini maupun perjanjian-perjanjian regional, multilateral dan bilateral dengan negara-negara lain. Jadi harapan

untuk adanya alih pengetahuan, manajemen dan teknologi dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, edisi revisi cetakan kedua, (Bandung: Nusa Aulia, 2007)

WEBSITE

<http://setyopamungkas.wordpress.com>, 8 Maret 2010, Setyo Pamungkas, "*Implikasi ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Hukum Investasi di Indonesia*", diakses pada tanggal 27 Mei 2012.
<http://www.google.search.com>, Daniel E Syauta dan Asniar, "*Pengaruh ASEAN- China Free Trade Agreement (ACFTA) terhadap bisnis Indonesia dan Internasional*", diakses pada tanggal 12 juli 2012

KORAN

"*Tidak Ada Desain Besar Hadapi ACFTA*", Kompas, 15 April 2011.

BAHAN AJAR

Bismar Nasution, "*Pengaruh Globalisasi Ekonomi pada Hukum Indonesia*", Bahan Kuliah Organisasi Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, medan, 2011